

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi saat ini menjadi hal penting yang harus diterapkan di berbagai sektor. Salah satunya adalah pelayanan publik berbasis digital oleh pemerintahan kepada masyarakat. Pihak pemberi pelayanan (birokrat) yang diharapkan masyarakat, haruslah kompeten di bidang yang mereka kelola, mengerti situasi dan kondisi.

Penetapan pelayanan administrasi kependudukan merupakan tanggung jawab pemerintah kota atau kabupaten, di mana pelaksanaannya diawali dari kelurahan atau desa. Pelayanan tersebut perlu dilakukan dengan cepat dan tepat seperti yang dijelaskan pada Peraturan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring[1].

Desa Banjaragung adalah salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara. Desa Banjaragung merupakan suatu instansi Pemerintahan Dalam Negeri yang bergerak di bidang pelayanan masyarakat. Pelayanan desa kepada masyarakat mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa terutama Pasal 82:

1. Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.
2. Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.
3. Masyarakat desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

4. Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
5. Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan desa[2].

Merujuk pada Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa perlu diselenggarakan sistem informasi yang bersifat nasional dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Penyelenggara diwajibkan mengelola sistem informasi, baik elektronik atau nonelektronik, sekurang-kurangnya meliputi; profil penyelenggara, profil pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelola pengaduan dan penilaian kinerja[3].

Saat ini informasi perkembangan Desa Banjaragung belum disosialisasikan ke masyarakat secara optimal dan hanya masyarakat tertentu yang mengetahui program desa. Hal ini mengakibatkan banyaknya masyarakat yang tidak mendukung agenda Pemerintahan Desa, sehingga tidak adanya kerjasama antara Pemerintahan Desa dengan masyarakat. Program-program desa yang sudah direncanakan oleh pemerintah maupun instansi tidak berjalan secara maksimal karena kurang pengawasan dari masyarakat.

Desa Banjaragung dalam melakukan pelayanannya kepada masyarakat masih terdapat beberapa masalah, pendataan kependudukan dan pencatatan sipil yang berupa data atau laporan belum dapat secara maksimal didayagunakan untuk pelayanan publik. Hal ini disebabkan belum adanya pangkalan data untuk kepentingan-kepentingan administratif yang dapat mensinergikan data penduduk ke petugas desa lainnya. Sistem yang saat ini digunakan masih manual, sering terjadinya kehilangan atau kerusakan arsip-arsip penting, terlambatnya data dan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pada aktifitas kependudukan, warga

diharuskan mengurus surat-surat permohonan yang diinginkan di kantor kelurahan atau desa dengan mengikuti prosedur-prosedur konvensional yang berlaku sehingga dalam pembuatan surat tertentu akan memakan waktu dan tenaga yang cukup lama.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, penulis tertarik untuk menganalisa dan merancang sebuah sistem informasi berbasis web dengan judul penelitian **“Anallsa dan Perancangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Desa Banjaragung”**, diharapkan dapat memberikan informasi perkembangan desa, menyimpan data secara dinamis serta dapat melayani permohonan surat kependudukan dengan mudah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka dirumuskan suatu masalah yang akan dipecahkan pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana agar petugas pemerintahan desa memberikan pelayanan administrasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat?
2. Bagaimana agar masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi perkembangan desa dan pelayanan publik?
3. Bagaimana merancang sistem informasi administrasi kependudukan?

1.3 Batasan Masalah

Adapun pembatasan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ini hanya dibuat pada tingkat desa atau kelurahan.
2. Desa yang menjadi objek penelitian ini adalah Desa Banjaragung, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara.
3. Aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai databasenya.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah mempermudah pelayanan dan sirkulasi informasi bagi pemerintahan desa maupun warga desa dengan membangun Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu pengertian mengenai pelayanan publik oleh Pemerintah Desa Banjaragung yang tentunya disertai dengan teori yang relevan dalam pembahasannya. Menambah wawasan dan pengetahuan para akademisi serta dapat digunakan sebagai bahan untuk mengembangkan dan menyempurnakan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Sebagai acuan dasar bagi peneliti untuk mengembangkan keilmuannya di tengah-tengah masyarakat serta membentuk sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Bagi warga desa, diharapkan dapat membantu mempermudah dalam urusan administrasi atau pelayanan permohonan surat-surat kependudukan di tingkat desa.

1.6 Metode Penelitian

Peneliti menjabarkan cara-cara memperoleh data-data yang digunakan untuk kebutuhan penelitian.

1.6.1 Metode Pengumpulan Data

1.6.1.1 Metode Observasi

Pengumpulan data secara langsung, mengamati permasalahan pelayanan di Kantor Pemerintahan Desa Banjaragung mengenai sistem yang saat ini digunakan.

1.6.1.2 Metode Wawancara

Teknis ini penulis berperan sebagai pewawancara dan mewawancarai pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Penulis melakukan wawancara langsung kepada petugas desa yang bersangkutan dan juga warga desa, permasalahan yang dibahas yaitu mengenai proses informasi dan layanan publik. Wawancara ini diperlukan untuk memperjelas dan meyakinkan atas fakta atau informasi yang diperoleh melalui pengamatan.

1.6.2 Metode Analisis

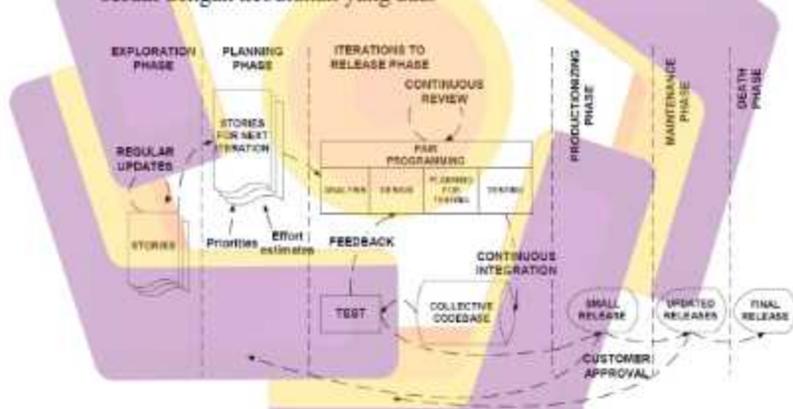
Pasca memperoleh data yang didapat dari proses observasi dan wawancara, perlu dilakukan analisa literatur terkait sistem informasi yang akan dirancang, baik kebutuhan umum atau khusus. Analisa dilakukan sesuai relevansi keadaan sosial dan hasilnya harus dideskripsikan.

Penulis menggunakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Threats) dan PIECES (Performance, Information, Economic, Control, Efficiency, Service). Analisis SWOT digunakan untuk melihat kondisi pada objek baik internal maupun eksternal yang kemudian dijadikan indikator untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, sehingga dapat membantu terbentuknya penyampaian informasi secara efektif dan efisien.

Untuk mengidentifikasi masalah, maka harus dilakukan analisis PIECES. Dari analisis ini biasanya didapatkan beberapa masalah utama. Hal ini penting karena biasanya yang muncul dipermukaan bukan masalah utama, tetapi hanya gejala dari masalah utama saja.

1.6.3 Metode Perancangan

Perancangan sistem akan menggunakan metode Extreme Programming yang merupakan salah satu metode dalam *Agile Methodology*. Metode XP ini lahir dan terus berkembang sebagai jawaban atas masalah-masalah yang ditimbulkan pada lamanya pengembangan perangkat lunak dengan model pengembangan tradisional. Model pengembangan tradisional mengacu soal perencanaan, analisa, dan perancangan sistem, dengan waktu yang lama untuk masing-masing tahap karena luasnya cakupan, maka XP menawarkan cara yang berbeda. XP menawarkan tahapan-tahapan tersebut dalam waktu yang singkat dan berulang untuk bagian-bagian yang berbeda sesuai dengan fokus yang akan dicapai. Jadi di XP ada iterasi yang bisa dilakukan berulang kali sesuai dengan kebutuhan yang ada.



Gambar 1.1 Tahapan Metode Extreme Programming.

Penggunaan metode ini ditemukan kelebihan dan kekurangan yang berkaitan dengan penyelesaian perangkat lunak tersebut. Lebih khusus juga ditemukan ternyata klien lebih berfokus pada solusi yang dihasilkan dibandingkan dengan jadwal waktu penyelesaian perangkat lunak^[4].

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini akan dilaporkan dengan sistem pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan konsep teoritis secara mendasar tentang sistem informasi, pelayanan administrasi kependudukan hingga perangkat lunak pendukung pembuatan sistem.

BAB III METODE PENELITIAN

Menjelaskan bagaimana sistem ini dibuat berdasarkan data hasil dari berbagai metode penelitian, melakukan analisis data, dan menentukan prioritas kebutuhan serta batasan dalam rancangan sistem.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil implementasi analisis dan perancangan yang telah dikerjakan yang terdapat pada bab sebelumnya, serta pengecekan terhadap sistem yang telah dibangun.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, dan juga berisi saran untuk perbaikan dan menindaklanjuti hasil

penelitian tentang penelitian sistem informasi administrasi
kependudukan.

